

# **Efektifitas Democracy Assistance USAID Bagi Pertumbuhan Ekonomi Timor Leste**

**Maria Indira Aryani**

*Dosen Program Studi Hubungan Internasional  
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur*

*e-mail: indira.aryani@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*This research will examine USAID’s democracy assistance for Timor Leste’s economic growth. The background of this research was Timor Leste’s failure as well as many challenges faced in order to create political stability after having received USAID’s democracy assistance. Hence, the research question from this background would be “why USAID’s democracy assistance provided through the Election and Processes framework has not been seen effective to bring positive impacts for Timor Leste’s economic growth?”. This question is analysed by using the foreign aid effectiveness framework, the assumption of democracy and economic growth connectivity and the assumption of political stability and economic growth connectivity. The conclusion of this analysis is that USAID’s democracy assistance provided to Timor Leste has not effectively support Timor Leste’s economic growth since there are some aid effectiveness characteristics that does not correspond with the characteristic and ability of the people Timor Leste. The discrepancy slows down the process of acceptance of democracy that led to the slow pace of individual understanding of the importance of political process. The slow process led to some cases of political conflict and violence in Timor Leste, disrupting political stability in Timor Leste, which ultimately risen the challenges to Timor Leste’s economic growth.*

**Keywords:** *democracy assistance, foreign aid effectiveness, democracy, political stability, economic growth.*

*Secara spesifik, penelitian ini menggunakan studi kasus democracy assistance USAID bagi pertumbuhan ekonomi Timor Leste. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa Timor Leste yang telah menerima bantuan berupa democracy assistance ternyata masih menghadapi berbagai tantangan dalam menciptakan stabilitas politik. Dari latar belakang tersebut kemudian dimunculkan permasalahan “mengapa democracy assistance USAID yang diberikan melalui kerangka Election and Political Processes (EPP) belum dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Timor Leste?” Permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan kerangka pemikiran efektifitas bantuan luar negeri, asumsi demokrasi dan pertumbuhan ekonomi serta asumsi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Didapatkan kesimpulan bahwa democracy assistance USAID belum efektif mendukung pertumbuhan ekonomi Timor Leste karena beberapa bantuan yang seringkali tidak sesuai dengan karakter dan kemampuan masyarakat Timor Leste, sehingga memperlambat proses penerimaan demokrasi dan lambatnya pemahaman individu mengenai pentingnya proses politik. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya beberapa kasus konflik dan kekerasan yang masih terjadi di Timor Leste sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi Timor Leste.*

**Kata-Kata Kunci:** *democracy assistance, efektifitas bantuan luar negeri, demokrasi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi.*

Timor Leste adalah negara muda yang terletak di Asia Tenggara. Timor Leste memperoleh kemerdekaan secara formal dan diakui sebagai suatu negara republik yang independen pada 20 Mei 2002 dengan pembentukan parlemen resmi Timor Leste (Timor Leste History 2010). Sebelum kemerdekaan, Timor Leste merupakan bagian dari koloni Portugis selama 400 tahun, menjadi bagian dari negara Indonesia selama 24 tahun, dan menjadi bagian dari *UN Administration* selama 2 tahun. Timor Leste termasuk ke dalam kategori negara miskin (*least developed country*) di Asia yang memiliki berbagai macam tantangan pembangunan berupa tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, kurang memadainya sektor publik, lemahnya sistem peradilan dan infrastruktur yang kurang memadai (Overview Timor Leste, 2010). Mengingat bahwa Timor Leste adalah negara yang baru merdeka, secara finansial, Timor Leste tidak memiliki dana yang cukup untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan. Terutama pasca Referendum, 75% infrastruktur di Timor Leste mengalami kehancuran (Chesterma 2001).

Melihat kesulitan yang dihadapi oleh Timor Leste ini, banyak bantuan luar negeri (*foreign aid*) yang masuk ke Timor Leste. Bantuan luar negeri yang masuk ke Timor Leste mulai pertengahan tahun 1999 hingga tahun 2009 tercatat sebesar 5.200 juta dolar Amerika (La'o Hamutuk 2009). Bantuan dana ini berasal dari berbagai macam donor dari berbagai macam negara di dunia. Bantuan dana ini tidak hanya berupa dana tunai, tetapi juga berbentuk serangkaian program pembangunan yang dilaksanakan oleh agensi bilateral dan multilateral. Bantuan tidak hanya terfokus pada sektor sosial dan ekonomi, namun juga sektor politis dan bahkan militer. Bantuan yang masuk ke Timor Leste masuk melalui berbagai macam institusi keuangan internasional. Berbagai institusi penyalur bantuan yang terlibat antara lain adalah agensi PBB, organisasi non pemerintah (*Non-Governmental Organizations/NGO*), agensi pembangunan internasional (USAID, AusAid, JICA), konsultan dan staf internasional, dan pelaku bisnis asing. Sedangkan tercatat lima negara donor terbesar bagi bantuan luar negeri di Timor Leste adalah Portugal, Australia, Amerika Serikat, Jepang dan *European Commission* (Neves 2006). Bentuk bantuan yang diberikan adalah hibah (*grant*) dan bukan pinjaman (*loan*) sehingga tidak memerlukan mekanisme pengembalian.

**Bantuan bagi Timor Leste, Juli 1999-Juni 2009**  
(dalam juta dolar Amerika, tanpa memperhitungkan inflasi)

| Form of assistance   | Year        | Amount           |
|--|-------------|------------------|
| <b>United Nations Missions</b><br>(most for int'l staff, soldiers, logistics, etc.)    |             | <b>\$2,353</b>   |
| UNAMET   | 1999        | 92               |
| UNTAET   | 1999-2002   | 1,430            |
| UNMISSET   | 2002-2005   | 302              |
| UNOTIL   | 2005-2006   | 22               |
| UNMIT  | 2006-2009   | 507              |
| <b>International military forces</b><br>(Not including UN PKF, which are listed above) |             | <b>\$750</b>     |
| Interfet (paid by contributing countries and Japan)                                    | 1999-2000   | 250              |
| International Stabilisation Force (ISF, mostly paid by Australia)                      | 2006-2009   | 500 <sup>o</sup> |
| <b>TFET (Trust Fund for East Timor)</b><br>(Donor money managed by WB and ADB)         | 2000-2005   | <b>\$170</b>     |
| <b>Donor budgetary support</b><br>(Donor direct grants to TL government budget)        | See Table 2 | <b>\$204</b>     |
| <b>Bilateral and multilateral donor projects</b>                                       | See Table 2 | <b>\$1,730</b>   |
| <b>Grand total</b>   |             | <b>\$5,207</b>   |

### Dana Bantuan Tahunan, Anggaran Negara dan Garis Besar Perekonomian, Juli 1999-Juni 2009

| Year*        | Donor projects | Budget support | State expen- ditures | Non-oil domestic revenue <sup>#</sup> | Petrol. revenue spent | Petrol. revenue saved | Non-oil GDP <sup>+</sup> | Imports      | Exports      |
|--------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1999         | 82             | 26             | n.a.                 | 2                                     | 0                     | 0                     | 126 <sup>*</sup>         | n.a.         | n.a.         |
| 2000         | 152            | 32             | n.a.                 | 14                                    | 14                    | 0                     | 288                      | n.a.         | n.a.         |
| 2001         | 197            | 23             | n.a.                 | 20                                    | 11                    | 0                     | 335                      | n.a.         | n.a.         |
| 2002         | 202            | 33             | 69                   | 19                                    | 29                    | 0                     | 313                      | n.a.         | n.a.         |
| 2003         | 199            | 35             | 67                   | 29                                    | 41                    | 0                     | 306                      | n.a.         | n.a.         |
| 2004         | 189            | 34             | 71                   | 34                                    | 64                    | 205                   | 309                      | 114          | 7            |
| 2005         | 105            | 10             | 93                   | 37                                    | 85                    | 366                   | 332                      | 102          | 8            |
| 2006         | 150 (est.)     | 11             | 137                  | 41                                    | 260                   | 733                   | 321                      | 88           | 9            |
| 2007 (6 mo)* | 99             | 0              | 56                   | 20                                    | 40                    | 633                   | 398                      | 199          | 8            |
| 2008         | 223            | 0              | 480                  | 45                                    | 396                   | 2004                  | 499                      | 258          | 13           |
| 2009 (6 mo)‡ | 132 (proj.)    | 0              | 181                  | 43                                    | 200                   | 817                   | 295 <sup>+</sup>         | 164          | 2            |
| <b>Total</b> | <b>\$1,730</b> | <b>\$204</b>   | <b>\$1,154</b>       | <b>\$304</b>                          | <b>\$1,140</b>        | <b>\$4,758</b>        | <b>\$3,523</b>           | <b>\$925</b> | <b>\$ 46</b> |

Salah satu contoh dari bantuan luar negeri adalah bantuan yang diberikan oleh USAID, lembaga donor Amerika Serikat. Pada tahun 2002, USAID memberikan dana sebesar 25 juta dolar Amerika yang khusus ditujukan untuk penguatan institusi demokrasi dan pemulihan ekonomi (USAID Development Clearing House 2002). Namun, tidak semua negara berhak mendapatkan *democracy assistance*. *Democracy assistance* hanya diberikan ke negara yang telah memenuhi tiga indikator atau tiga tahapan pembangunan demokrasi, yakni *political opening structure*, *transition*, dan *democracy consolidation* (Carothers 1999). Dalam hal ini, Timor Leste telah memenuhi ketiga indikator tersebut. *Political opening structure* Timor Leste adalah adanya referendum pada 30 Agustus 1999, dimana Timor Leste memutuskan untuk merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia (Background Note: Timor Leste 2010). Tahapan *transition* di Timor Leste ditandai dengan adanya proses pemilu, yang dilaksanakan pada 14 April 2002, yang memilih Xanana Gusmao sebagai presiden pertama Timor Leste (History of East Timor 2010). Dan tahapan yang ketiga adalah *democracy consolidation* yang memfokuskan diri pada penguatan institusi demokrasi (*capacity building*).

*Democracy assistance* merupakan bantuan luar negeri yang memfokuskan diri dan melihat bahwa kekuatan politik dan institusi formal maupun informal, nasional maupun internasional ikut mempengaruhi pembangunan manusia seutuhnya (Carothers 1999). Bantuan ini melihat adanya kaitan yang erat bagaimana pembangunan manusia seutuhnya dapat dicapai bila dilaksanakan oleh pemerintahan yang demokratis. Bila pemerintahan demokratis telah terbentuk, maka diharapkan proses pembangunan di bidang yang lain juga akan dapat terlaksana dengan mudah. Salah satu bidang pembangunan yang diharapkan dapat ikut terlaksana dengan adanya *democracy assistance* adalah pembangunan ekonomi (*economic development*). Berdasarkan laporan *Index of Economic Freedom 2010*, perekonomian Timor Leste menempati urutan ke 164 dunia (The Heritage Foundation 2010). Pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan proses pembangunan ekonomi suatu negara (Todaro dan Smith 1998).

Tantangan utama bagi Timor Leste adalah untuk menciptakan stabilitas politik melalui penciptaan sistem demokrasi yang berkualitas untuk dapat menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa secara keseluruhan (Margesson dan Vaughn 2009). Tantangan tersebut diharapkan dapat teratasi dengan adanya *democracy assistance* yang diberikan oleh USAID ke Timor Leste. Agar dapat memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi, *democracy assistance* yang masuk ke Timor Leste harus dapat dilaksanakan dan digunakan secara efektif. *Democracy assistance* yang masuk ke Timor Leste ternyata belum dapat memberikan efektifitas yang maksimal. Oleh sebab itu, pertanyaan besar dalam penelitian ini adalah mengapa *Democracy Assistance* USAID yang diberikan melalui kerangka *Election and Political Processes* (EPP) belum dapat secara efektif memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Timor Leste?

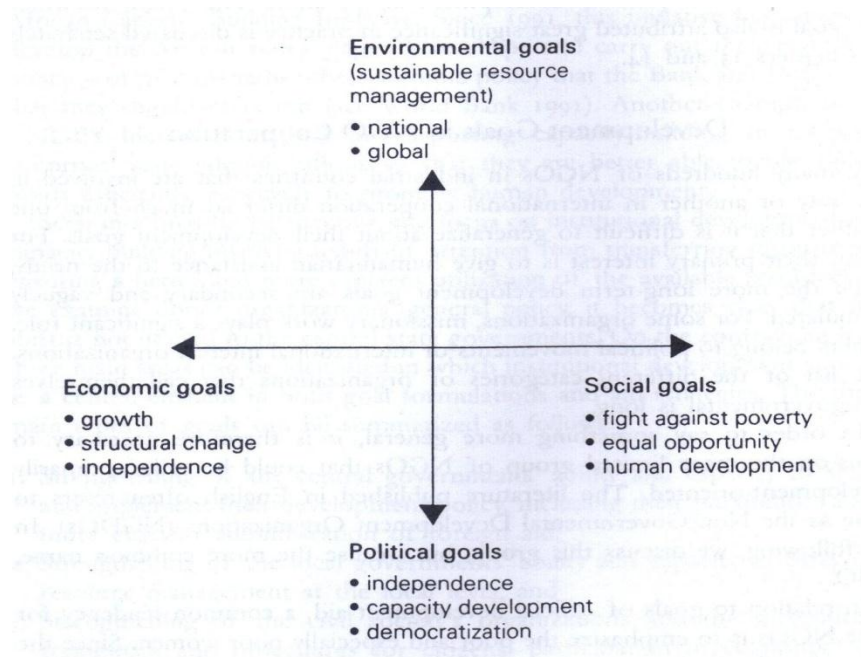
### **Efektifitas Bantuan Luar Negeri, Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Stabilitas Politik Bagi Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk dapat melihat dampak dari *democracy assistance* USAID bagi pertumbuhan Timor Leste diperlukan serangkaian asumsi sebagai pijakan berpikir. Beberapa asumsi yang coba digunakan antara lain efektifitas bantuan luar negeri, asumsi demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, serta asumsi stabilitas politik bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya pemberian bantuan luar negeri, perlu dilihat efektifitas bantuan luar negeri tersebut dalam mencapai tujuan. Bantuan luar negeri dikatakan efektif pada saat tujuan dari pemberian bantuan tersebut tercapai. Tidak semua bantuan luar negeri menjadi efektif dalam upaya pencapaian tujuannya. Kurang efektifnya bantuan luar negeri tersebut, menurut William Easterly dan Tobias Pfutze, disebabkan oleh banyak hal (Easterly dan Pfutze 2008).

Pertama, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Transparansi dalam pengelolaan dana perlu dilakukan oleh pihak pemberi bantuan (donor) maupun pihak penerima bantuan agar efisiensi dan efektifitas antara program dan dana yang tersedia dapat ditingkatkan. Kedua, tidak adanya spesialisasi atau fragmentasi. *Aid agencies* (agen pemberi bantuan) seringkali memberikan bantuan pada semua bidang (kesehatan, air bersih, kemiskinan, dan lain sebagainya), tidak fokus dalam satu bidang saja sehingga sering terjadi *overlapping* yang membuat bantuan tersebut menjadi tidak efektif. Ketiga, kurangnya *selectivity*. Pendonor harus selektif dalam menentukan pihak mana yang patut dibantu dan pihak mana yang tidak.

Sedikit berbeda dengan William Easterly dan Tobias Pfutze, John Degenbol-Martinussen dan Paul Engberg-Pedersen melihat bantuan luar negeri sebagai satu kesatuan instrumen yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan. Dalam melihat efektifitas bantuan luar negeri, perlu dilihat juga bahwa bantuan luar negeri memiliki tujuan pembangunan yang terdiri dari beberapa dimensi (Degenbol-Martinussen dan Engberg-Pedersen 2003). Dimensi-dimensi tersebut antara lain adalah dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi lingkungan. Keempat dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bantuan luar negeri dikatakan efektif pada saat bantuan tersebut dapat memenuhi tujuan awal pemberian bantuan, namun menjadi lebih efektif pada saat bantuan memberikan hasil yang dari sekedar mencapai tujuan. Oleh sebab itu, bantuan luar negeri dikatakan lebih efektif dilihat melalui kemampuannya untuk mencapai keempat dimensi pembangunan tersebut. Keempat dimensi tersebut dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

## Aspek Pembangunan dari Bantuan Luar Negeri



Bantuan luar negeri seperti di atas sering dikatakan sebagai bantuan luar negeri dengan orientasi pembangunan. Bantuan diberikan untuk meningkatkan pembangunan negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai keempat orientasi pembangunan tersebut, diperlukan adanya mekanisme *spillover*. Secara sederhana, *spillover* berarti bahwa pencapaian di satu sektor atau di satu area geografi akan mempengaruhi aktor di sektor atau area lain untuk mengadopsi pendekatan yang sama yang menghasilkan pencapaian tersebut (Manor, 2007). Hal ini yang kemudian diharapkan, yakni bahwa keberhasilan pencapaian di satu dimensi pembangunan akan dapat mendukung keberhasilan di dimensi yang lain. *Spillover* tidak hanya diharapkan dapat terjadi pada dimensi-dimensi pembangunan saja, namun juga dapat terjadi dalam agensi pemerintah, agensi donor, organisasi *civil society* atau dalam masyarakat. *Spillover* seperti ini seringkali terjadi secara alami dan terkadang tidak terencana.

Selain efektifitas bantuan luar negeri, dapat digunakan juga asumsi demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan mengenai hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi berangkat dari pemikiran pembangunan neoklasik yang melihat bahwa dalam pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya fungsi pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi akan berlangsung maksimal bila ada kemerdekaan ekonomi dalam bentuk pasar bebas. Kemerdekaan ekonomi ini dilihat oleh Friedman memiliki hubungan yang saling menguatkan dengan kemerdekaan politik yang hanya dapat dicapai melalui demokrasi (Friedman 1994). Perluasan hak-hak politik melalui demokrasi kemudian dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Demokrasi memungkinkan administrasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan bebas korupsi (Rivera-Batiz 2010). Demokrasi dapat meningkatkan kualitas institusi pemerintahan. Dalam sistem yang demokratis, masyarakat dapat memilih wakil rakyat untuk keluar dari jabatannya bila dirasa terjadi korupsi. Dengan mekanisme ini, maka kualitas institusi pemerintah akan selalu terjaga.

Institusi demokrasi menyediakan kontrol terhadap kekuatan pemerintah yang kemudian membatasi kemungkinan adanya upaya korupsi dan dapat mengurangi

adanya kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Diharapkan dengan adanya demokrasi, dapat diciptakan suatu sistem pemerintahan yang lebih baik dengan adanya institusi demokrasi yang lebih baik yang dapat menunjang perekonomian. Bentuk dukungan pemerintah dalam perekonomian adalah dengan pembuatan kebijakan yang lebih mendukung perekonomian. Salah satu tugas utama pemerintah adalah mengatur mekanisme pasar oleh sebab itu dalam usaha pembangunan institusi pemerintah pertama-tama diperlukan penilaian akan hal-hal yang menghambat perkembangan pasar atau mendominasi pasar. Perhatian utama para pembuat kebijakan adalah harus dapat mengevaluasi dan menemukan informasi apa sajakah yang memungkinkan pasar berfungsi dengan baik, apakah terdapat definisi dan upaya penegakan hak kekayaan intelektual yang jelas, dan apakah terdapat kompetisi antara pelaku ekonomi (Hout 2007). Fungsi kontrol pemerintah terhadap efisiensi pasar merupakan salah satu hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki fungsi penciptaan, perlindungan dan penegakan hak properti yang mana tanpanya ruang lingkup transaksi pasar menjadi dibatasi. Termasuk di dalamnya kemudian pengawasan terhadap pembuatan kebijakan yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi kompetisi pasar (Hout 2007).

Menurut De Haan dan Siermann, demokrasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung (De Haan dan Siermann 1995). Lebih lanjut, institusi demokrasi merupakan bentuk institusi paling efektif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dimana institusi demokrasi dapat menciptakan sistem *checks and balances*. Sistem ini kemudian dapat mengendalikan kekuasaan pemerintah dan membatasi potensi terjadinya implementasi dari kebijakan yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Sistem demokrasi juga dianggap lebih mampu memberikan perlindungan terhadap kepemilikan swasta, yang seringkali dianggap oleh para ahli ekonomi sebagai dasar dari perkembangan material pertumbuhan ekonomi. Demokrasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi karena efek positif pada hal-hal seperti biaya pendidikan, harapan hidup dan stabilitas politik (Drury et.al. 2006). Selain itu, demokrasi mempromosikan stabilitas politik, yang juga dikenal baik untuk pertumbuhan ekonomi.

Asumsi terakhir yang digunakan adalah asumsi stabilitas politik bagi pertumbuhan ekonomi. Kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan politik akan menghambat pembangunan ekonomi. Dengan adanya sistem politik yang stabil, maka akan tercipta suatu pemerintahan yang baik yang dapat digunakan sebagai pendorong proses pembangunan ekonomi dengan semakin berkurangnya korupsi dan meningkatnya kapasitas pemerintah untuk memberikan pelayanan publik. Dengan penguatan sistem pemerintahan, diharapkan juga dapat mendukung upaya sistem perundangan sehingga akan dapat dihasilkan peraturan dan perundangan yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Mengutip dari laporan Bank Dunia mengenai demokratisasi di Amerika Latin, Terry F. Buss dan Adam Gardner mengasumsikan bahwa sistem politik demokrasi yang stabil dan dukungan pemerintah akan mendukung fungsi maksimal dari perekonomian, dan akan tercipta perdamaian dan keamanan (Picard 2008).

Di dalam suatu negara dengan sistem politik yang tidak stabil, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung lebih lambat. Sistem politik yang tidak stabil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sistem politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena ketidakstabilan politik meningkatkan ketidakpastian dan meningkatnya rasa tidak aman yang memiliki dampak negatif terhadap produktivitas pengambilan keputusan perekonomian, seperti halnya yang

berhubungan dengan investasi. Probabilitas perubahan dalam sistem pemerintahan yang tinggi mencerminkan ketidakpastian kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan resiko terhadap produktivitas dan ekonomi dan dapat meningkatkan resiko penanaman modal. Besarnya resiko-resiko penanaman modal akan dapat menghalau investor asing yang hendak menanamkan modal karena investor asing lebih memilih negara dengan situasi politik yang lebih stabil. Ketidakstabilan politik terjadi saat rezim politik menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan politik menyebabkan penurunan tingkat tabungan yang dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu stabilitas politik penting bagi penciptaan jaminan keamanan negara yang dapat mendorong masuknya investasi dan menjamin legitimasi pemerintah. Dengan meningkatnya investasi dan jaminan keamanan bagi warga negara, akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam perekonomian yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

### ***Democracy Assistance USAID di Timor Leste***

*Democracy assistance* yang diberikan oleh USAID merupakan bantuan yang berada dalam lingkup kerja badan demokrasi dan tata pemerintahan (*Democracy and Governance/ DG*). Selama lebih dari 50 tahun, USAID telah memberikan dukungan strategis dan kepemimpinan teknis dalam mempromosikan demokrasi yang berkelanjutan. Tujuan badan *Democracy and Governance* USAID meliputi penguatan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mempromosikan proses pemilu dan proses politik yang kompetitif, meningkatkan pengembangan *civil society* yang lebih aktif secara politik, menciptakan tata pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, dan penguatan media yang bebas dan independen (USAID, 2011). Program DG USAID dan pemerintah berfokus pada dua bidang, yakni perdamaian dan keamanan, dan pemerintahan yang adil dan demokratis.

USAID bekerja untuk membantu Timor Leste menjadi negara yang stabil, aman, demokratis dan sejahtera melalui program-program penguatan dasar-dasar demokrasi. *Good governance* dipandang oleh USAID sebagai kebutuhan dasar untuk pengembangan stabilitas politik dan ekonomi (USAID 2011). USAID telah mendukung pengembangan proses pemilu dan politik di Timor Leste sejak tahun 1999. Sejak tahun 1999, Timor Leste telah mengembangkan kerangka demokratis, memperoleh kemerdekaan dan mengelola pemilu daerah dan nasional. Meskipun Timor Leste masih mengalami kekerasan periodik, namun pemerintah telah membuat langkah signifikan terhadap konsolidasi institusi dan sistem demokrasi, termasuk pemindahan kekuasaan dari satu pemerintah yang terpilih secara demokratis ke pemerintahan terpilih yang lain. Program USAID memberikan kontribusi besar untuk memperlancar pelaksanaan program pemerintah Timor Leste pada masa awal kemerdekaan Timor Leste (USAID East Timor 2011).

Timor Leste telah membuat kemajuan besar dalam pemerintahan dan demokrasi sejak kemerdekaan pada 20 Mei 2002. Sebuah konstitusi demokrasi telah diratifikasi sebagai dasar utama dari sebuah negara demokrasi, yakni pembentukan institusi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Upaya membentuk pemerintahan yang demokratis kemudian diwujudkan dengan diadakan pemilu yang bebas dan adil untuk Presiden dan Majelis Konstituante, yang kemudian menjadi Parlemen (Porter dan Rab 2006). Pemerintahan demokratis Timor Leste dilengkapi dengan adanya keterlibatan NGO, media cetak dan media elektronik independen yang turut mendukung perdebatan tentang isu-isu penting pemerintahan (La'o Hamutuk 2011).



Tantangan bagi Timor Leste sekarang adalah untuk mengkonsolidasikan institusi-institusi pemerintahan baru untuk mengembangkan suatu mekanisme *checks and balances*, menanamkan norma-norma dan praktek demokrasi dan perluasan institusi-institusi pemerintahan yang demokratis di tingkat daerah (Asian Development Bank 2006). Sistem yang ada sebelumnya masih sangat terpusat pada institusi eksekutif dan partai yang berkuasa. Selanjutnya, pemerintah masih berusaha membangun beberapa institusi yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan peraturan tetapi belum sepenuhnya dikembangkan. Sebuah faktor penghambat dalam pengembangan institusi di Timor Leste adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang ada.

Untuk mendukung upaya konsolidasi dan penguatan institusi, USAID memiliki program yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi tata kelola pemerintahan yang didanai hibah dan mekanisme global yang disebut mekanisme *Electoral and Political Processes* (EPP) (USAID 2008). *Democracy Assistance* dan kerangka EPP yang berada di bawah badan *Democracy and Governance* USAID bertujuan untuk membantu Timor Leste mencapai stabilitas politik dan keamanan, melalui program-program penguatan dasar-dasar demokrasi yang pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan. Program tersebut antara lain adalah penguatan kerangka administratif pemilu dan pengawasan pemilu, penguatan partai politik dan partisipasi partai politik dalam pemerintahan, penguatan tata kelola pemerintahan yang terpilih dan peningkatan partisipasi masyarakat (USAID 2008). *Democracy assistance* yang diberikan oleh USAID melalui mekanisme EEP menghabiskan dana sebesar lebih dari 9 juta dolar Amerika (USAID 2008). Bantuan EPP USAID disediakan melalui serangkaian perjanjian dengan sejumlah institusi pelaksana, yang sering disebut sebagai institusi implementer (USAID 2008).

### Alokasi Dana *Democracy Assistance* USAID melalui Mekanisme EPP

| USAID/TIMOR LESTE<br>ELECTORAL AND POLITICAL PROCESSES PROGRAMS <sup>24</sup> |   |                   |                     |           |
|---|---|-------------------|---------------------|-----------|
| Implementer   | Title   | Number            | Dates               | \$        |
| CEPPS<br>(IFES, IRI, NDI)   | Electoral Support<br>& Local Governance   | 497-A-00-05-00025 | 02/25/05 – 03/31/08 | 3,950,000 |
| IRI   | East Timor<br>Political Parties   | 497-A-00-02-00053 | 09/30/02 - 01/31/05 | 1,557,134 |
| IFES  | Elections Support<br>in East Timor  | 497-G-00-01-00039 | 07/23/01 – 03/31/05 | 499,997   |
| NDI   | Citizen Participation<br>& Political Party Development,<br>Civic Forum                          | 497-G-00-01-00015 | 03/31/01 - 06/30/06 | 2,736,490 |
| IRI   | Elections Support for East Timor<br>Political Party Training &<br>Supporting Women's Leadership | 497-G-00-01-00013 | 03/22/01 - 10/15/02 | 820,000   |
| <b>TOTAL</b>  |   |                   | 03/22/01 - 03/31/08 | 9,563,621 |

Program kerja EPP USAID di Timor Leste meliputi penguatan kerangka administratif dan pengawasan pemilu, penguatan partai politik dan partisipasi partai politik dalam pemerintahan, penguatan tata kelola pemerintahan yang terpilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Tujuan tersebut diimplementasikan melalui berbagai sub-program, antara lain mengembangkan kerangka pemilu yang tidak memihak untuk mencapai konsensus, meningkatkan kapasitas partai politik untuk terlibat dalam pengembangan undang-undang pemilu nasional, untuk bersaing dalam pemilu 2007 dan untuk memberikan dukungan pada pemimpin daerah terpilih, mengembangkan peran pengawasan komisi pemilu independen, meningkatkan administrasi pemilu melalui departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola pemilu dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah terpilih, meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dan pemuda dalam pemerintahan lokal,



serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu nasional sebagai pemilih, pengawas dan atau calon wakil rakyat (USAID 2008).

### **Efektifitas *Democracy Assistance* USAID Di Timor Leste dan Dampaknya Bagi Stabilitas Politik Timor Leste**

Pada kenyataannya, program *democracy assistance* yang diberikan USAID melalui kerangka EPP belum sepenuhnya maksimal untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan proses demokratisasi di Timor Leste. Agar *democracy assistance* USAID dapat dikatakan efektif, maka *democracy assistance* harus dapat memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah bahwa *democracy assistance* dapat memenuhi kebutuhan Timor Leste untuk meningkatkan kualitas proses politik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bersifat *bottom up* dalam artian bahwa kebutuhan masyarakat Timor Leste yang menentukan kerangka *democracy assistance*, mampu memiliki kerangka yang bersifat lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Timor Leste, mementingkan peranan evaluasi untuk mencegah adanya pengulangan yang tidak efektif, tidak menggunakan rencana besar melainkan rencana kecil yang lebih sederhana sehingga dapat dengan mudah diimplementasikan. Agar dapat mencapai efektifitas, *democracy assistance* juga harus dapat bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang mungkin terjadi dan bersifat terdesentralisasi sehingga dapat menjangkau seluruh sasaran penerima bantuan.

Karakteristik *democracy assistance* USAID di Timor Leste tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Timor Leste, namun bentuk bantuan dan program yang dirancang sebagai bagian dari pelaksanaan bantuan tersebut telah ditetapkan oleh USAID yang menyebabkan bantuan bersifat kurang *bottom up*. *Democracy assistance* yang diberikan oleh USAID juga seringkali kurang disesuaikan dengan kerangka lokal dan lebih bersifat global. Kritik terhadap *democracy assistance* USAID adalah bahwa seringkali program yang dilaksanakan melalui kerangka EPP kurang memperhatikan kondisi sosial dan latar belakang masyarakat Timor Leste. Anggapan lain melihat bahwa kesulitan-kesulitan dan permasalahan-permasalahan yang muncul dengan pemberian bantuan ini mencerminkan ketidakmampuan donor dan masyarakat untuk menghubungkan upaya *state-building* dengan pemerintahan lokal, dan menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada model kelembagaan yang diimpor.

Timor Leste secara tradisional diperintah oleh kelompok kecil berbasis politik yang berdasarkan pada kesamaan pribadi, masing-masing partai politik masih mengangkat kepentingan pribadi kelompok dibandingkan dengan kepentingan masyarakat banyak. Dengan adanya kenyataan ini, bantuan seharusnya diberikan sesuai dengan struktur politik dan kemampuan masyarakat untuk memahami politik, dibandingkan dengan menerapkan model kelembagaan baru yang dibawa oleh donor. *Democracy assistance* USAID yang kurang efektif tersebut ternyata berdampak pada kurang stabilnya situasi politik di Timor Leste. Ketidakstabilan politik tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada saat pemilu. Kekerasan yang berkaitan dengan pemilu kerap terjadi di Timor Leste. Terhitung hingga tahun 2007, Timor Leste telah melaksanakan enam kali pemilu sejak tahun 1999.

Kekerasan pemilu yang terjadi di Timor Leste mulai terjadi sejak tahun 1999 saat pelaksanaan Referendum. Kekerasan pemilu pada tahun 1999 meningkat drastis setelah pelaksanaan referendum. Setidaknya 60.000 jiwa mengalami penyiksaan fisik dan terpaksa meninggalkan rumah, 900 lebih masyarakat sipil dibunuh dan 400.000 jiwa terpaksa mengungsi ke Timor Barat dan lebih dari 80% infrastruktur mengalami

kehancuran. Kekerasan pemilu yang terjadi selama proses pemilu tahun 2001 meliputi intimidasi dan penyerangan selama masa kampanye oleh FRETILIN. Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tanggal 14 April 2002 untuk memilih presiden. Pada pemilu kali ini, intimidasi masih terjadi, namun tidak terlihat kekerasan fisik karena persaingan difokuskan pada persaingan antar calon presiden dibandingkan dengan persaingan partai politik yang terjadi pada pemilu tahun 2001. Pemilu selanjutnya dilaksanakan selama bulan Desember 2004 hingga September 2005 untuk memilih kepala daerah dan dewan daerah. Pemilu kali ini juga relatif lebih bebas dari insiden fisik, namun intimidasi masih terjadi oleh partai politik dan tokoh politik lokal (Soaresvet.al. 2007).

Pada tahun 2007, Timor Leste melaksanakan dua kali pemilu. Pemilu presiden dilaksanakan dalam dua putaran, putaran pertama pada tanggal 9 April 2007 dan putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2007. Sedangkan pemilu parlemen nasional di Timor Leste dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2007, dengan kandidat dari 14 partai dan koalisi untuk memperebutkan 65 kursi. Kekerasan pemilu yang terjadi selama pemilu tahun 2007 tidak lepas dari serangkaian kekerasan yang telah dimulai sejak April 2006, yang memiliki dampak besar pada situasi politik dan keamanan Timor Leste. Kekerasan yang terjadi pada tahun 2006 merupakan bentuk konfrontasi antara kelompok *petitioners* dalam militer dengan pemerintah untuk mengatasi keluhan yang terkait sikap favoritisme daerah berujung pada pemecatan sekitar 600 tentara yang telah menolak untuk kembali ke barak. Perseteruan pecah antara tentara dan polisi, dan menimbulkan kerusuhan sipil diikuti dengan perseteruan antar kelompok di jalanan. Perseteruan terus berlanjut hingga bulan Juni 2006 dan mengakibatkan jatuhnya 37 korban jiwa dan menyebabkan lebih dari 150.000 orang mengungsi.

Rekomendasi yang muncul bagi USAID di Timor Leste dalam bidang demokrasi dan pemerintahan (*democracy and governance*) mencatat bahwa program USAID yang telah dilaksanakan di Timor Leste tidak memadai untuk merespon krisis yang terjadi pada saat itu atau secara substansial tidak dapat mengidentifikasi pemicu utama konflik. Kegagalan ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan-permasalahan, baik teknis, maupun non-teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi Timor Leste. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa efektivitas *democracy assistance* USAID di Timor Leste masih belum maksimal. Beberapa bidang pemerintahan dan demokrasi mengalami penguatan, namun di beberapa bidang yang lain masih mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi meliputi terjadinya beberapa konflik di Timor Leste sebagai akibat dari lemahnya sistem pemerintahan dan buruknya kesadaran politik masyarakat Timor Leste.

### **Pengaruh Stabilitas Politik Bagi Pertumbuhan Ekonomi Timor Leste**

Pada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai efektivitas *democracy assistance* dan dampaknya bagi upaya penciptaan stabilitas politik di Timor Leste. *Democracy assistance* yang belum efektif ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas politik yang maksimal. Sementara itu, stabilitas politik adalah salah satu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Dengan terciptanya stabilitas politik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi juga dapat bergerak ke arah yang positif. Demikian pula yang diharapkan dapat terjadi di Timor Leste. Perekonomian Timor Leste telah banyak mengalami guncangan dengan banyaknya perang dan konflik sipil (Stevens dan Cassiandri 2007). Pada tahun 1999, setelah referendum memilih kemerdekaan dari

Indonesia dan kekerasan yang terjadi pada bulan April 2006 yang meliputi serangkaian serangan militer, menimbulkan gangguan yang sangat besar terhadap perekonomian Timor Leste. Muncul berbagai permasalahan, terutama adalah pengangguran yang mencapai 50% dari angkatan kerja. Akibat dari tingginya angka pengangguran, terjadi peningkatan angka kemiskinan.

Pemulihan ekonomi di Timor Leste pasca referendum mulai menunjukkan hasil yang positif sejak tahun 2004 dimana pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang positif. Hasil pembangunan ekonomi juga mulai terlihat dengan banyaknya pembangunan infrastruktur ekonomi seperti perusahaan konstruksi, pasar, bank dan fasilitas ekonomi lainnya. Namun pemulihan ekonomi setelah serangan dari kekerasan yang terjadi di Timor Leste pasca referendum tahun 1999 menerima kemunduran besar ketika kekerasan meluas dan terjadi kerusakan pada tahun 2006. Kekerasan dan kerusakan yang terjadi kemudian berdampak pada rusaknya infrastruktur, menyebabkan perpindahan penduduk besar-besaran, khususnya di ibukota, dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menyusut hingga sebesar 5,8% (La'o Hamutuk 2011). Kerusakan dan kekerasan yang terjadi pada tahun 2006 adalah puncak dari kekerasan terkait pemilu yang berlangsung sejak tahun 2006. Kekerasan tersebut kemudian berdampak pada proses pertumbuhan ekonomi Timor Leste.

### **Indikator Perekonomian Timor Leste dari Tahun 2002 hingga 2006**

|   | 2002    | 2003    | 2004    | 2005       | 2006 e/          |
|---|---------|---------|---------|------------|------------------|
| <b>Output and Prices</b>  |         |         |         |            |                  |
| GDP (non-oil) real growth rate, %   | -6.7    | -6.2    | 0.3     | 2.3        | -1.6             |
| Inflation, % change   | 9.5     | 4.2     | 1.8     | 0.9        | 5.7              |
| GNI, at current prices, \$ million  | 352     | 349     | 507     | 692        | 847              |
| Non-oil GDP   | 343     | 336     | 339     | 350        | 356              |
| Oil and gas income  | 9       | 13      | 168     | 342        | 492              |
| Population, thousands   | 892     | 922     | 952     | 983        | 1015             |
| Non-oil GDP per Capita, \$  | 385     | 364     | 356     | 356        | 351              |
| GNI per Capita, \$  | 395     | 378     | 532     | 704        | 835              |
| <b>External Sector, \$ million</b>  |         |         |         |            |                  |
| Merchandise Exports   | 6       | 8       | 8       | 9          | 8                |
| Merchandise Imports   | 218     | 194     | 163     | 137        | 141              |
| Trade Balance   | -211    | -186    | -154    | -127       | -133             |
| Services, net   | -44     | -37     | -32     | -27        | -33              |
| Foreign Income, net   | 4       | 4       | 43      | 83         | 117              |
| o/w: Oil and gas royalty and interest   | 2       | 2       | 39      | 79         | 115              |
| Current Transfers, net  | 123     | 134     | 246     | 363        | 460              |
| o/w: Oil and gas tax revenue  | 7       | 11      | 129     | 264        | 377              |
| o/w: International assistance   | 116     | 123     | 118     | 100        | 82               |
| Current Account Balance   | -128    | -85     | 103     | 292        | 411              |
| Capital and Financial Account   | 148     | 103     | 18      | 49         | 71               |
| o/w: Official capital transfers   | 59      | 44      | 41      | 41         | 44               |
| Overall Balance   | 20      | 18      | 121     | 341        | 482              |
| <b>Fiscal Operations (Central Government Budget, cash basis, fiscal year (July-June)), \$ million</b> |         |         |         |            |                  |
|   | FY02-03 | FY03-04 | FY04-05 | FY05-06 p/ | FY06-07<br>Q1-Q3 |
| Total Revenue, inc. grants  | 81.3    | 105.4   | 336.7   | 485.0      | 702.1            |
| Oil and gas revenue   | 30.9    | 40.3    | 261.0   | 448.0      | 674.3            |
| Domestic revenue  | 19.3    | 29.2    | 36.9    | 33.4       | 27.8             |
| Expenditure   | 68.5    | 68.4    | 71.4    | 93.0       | 80.8             |
| Current expenditure   | 53.3    | 53.1    | 56.4    | 66.3       | 75.2             |
| Capital expenditure I/  | 4.7     | 2.4     | 2.8     | 15.7       | 5.6              |
| Overall Fiscal Balance  | 12.8    | 37.0    | 265.3   | 392.1      | 621.3            |
| Memo: Cumulative Oil and Gas Savings  | 10.5    | 13.9    | 70.1    | 649.8      | 1,218.0          |

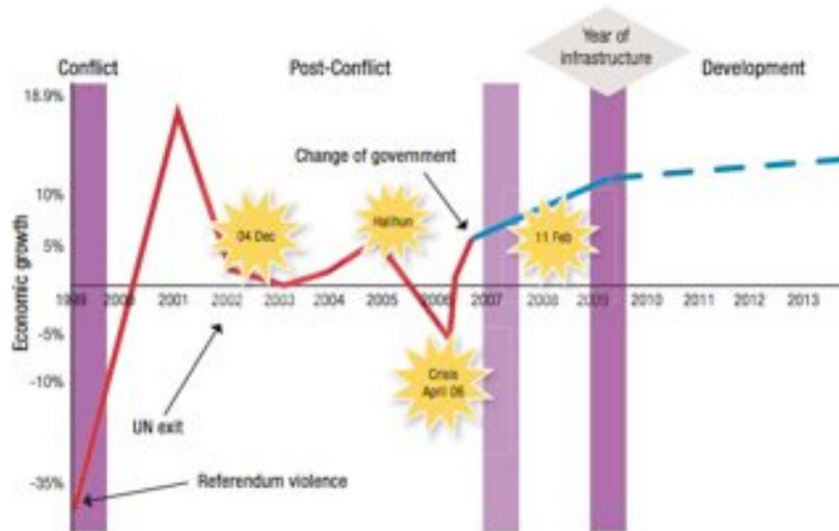
**Indikator Perekonomian Timor Leste dari Tahun 2006 Hingga 2010**

| <i>Recent economic indicators:</i> | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010(a) | 2011(b) |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| GDP (US\$m) (current prices):      | 327   | 358   | 444   | 556   | 628     | 709     |
| GDP PPP (US\$m) (c):               | 1,963 | 2,205 | 2,500 | 2,850 | 3,051   | 3,311   |
| GDP per capita (US\$):             | 337   | 361   | 437   | 534   | 588     | 649     |
| GDP per capita PPP (US\$) (c):     | 2,027 | 2,222 | 2,460 | 2,737 | 2,861   | 3,031   |
| Real GDP growth (% change yoy):    | -5.8  | 9.1   | 11.0  | 12.9  | 6.1     | 7.3     |
| Current account balance (US\$m):   | 541   | 1,177 | 2,023 | 1,363 | 1,425   | 1,395   |
| Current account balance (% GDP):   | 165.5 | 329.0 | 455.6 | 245.4 | 227.1   | 196.9   |
| Goods exports (% GDP):             | 2.8   | 2.2   | 3.2   | 1.7   | na      | na      |
| Inflation (% change yoy):          | 4.1   | 8.9   | 7.6   | 0.1   | 4.9     | 6.0     |

Seperti dapat dilihat dari kedua tabel di atas, maka akan terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata Timor Leste mengalami penurunan pasca terjadinya kekerasan yang terkait dengan pemilu yang mencapai puncak pada tahun 2006 (Asian Development Bank 2006; Asian Development Outlook 2011). Terhitung sejak tahun 2002 hingga 2005, perekonomian Timor Leste terus mengalami pertumbuhan berturut-turut sebesar 0,5%; 5,9%; dan 2%. Namun pasca terjadinya kerusuhan pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Timor Leste mengalami kemunduran sebanyak 5,8%. Perekonomian Timor Leste kembali mengalami pertumbuhan pada tahun 2007 sebesar 9,1%. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste terus mengalami pertumbuhan hingga tercapat pada tahun 2008 dan 2009 mencapai 11% dan 12,9%. Stabilitas politik memiliki dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi yang positif.

Dapat dilihat bahwa pada saat kekerasan pasca referendum terjadi pada tahun 1999, tingkat pertumbuhan ekonomi Timor Leste mencapai titik terendahnya (Asian Development Outlook, 2011). Seiring dengan berjalannya waktu dan dibentuknya sistem pemerintahan baru dengan dipilihnya Majelis Konstituante (Parlemen), maka perlahan-lahan pertumbuhan ekonomi Timor Leste mulai mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Timor Leste pada tahun 2001 hingga akhir 2002 sebagian besar disebabkan dengan banyaknya bantuan luar negeri kemanusiaan (*humanitarian aid*) yang masuk ke Timor Leste. Selain itu, dengan adanya pemerintahan baru yang mulai terbentuk, tingkat kepercayaan investor meningkat dan masyarakat juga mulai terlibat dalam proses perekonomian. Keberadaan pasukan perdamaian turut meningkatkan keamanan yang pada akhirnya dapat meyakinkan investor dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Salah satu hambatan perekonomian yang terjadi adalah kurangnya infrastruktur dan kemampuan masyarakat serta belum adanya kerangka perundangan yang jelas.

## Skema Pertumbuhan Ekonomi Timor Leste Pasca Referendum



Pertumbuhan ekonomi Timor Leste perlahan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2004 dan 2005 dengan mulai meningkatnya investasi untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas infrastruktur. Pada tahun 2005 Timor Leste juga telah memulai produksi migas dan hal ini kemudian terbukti dapat meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan negara juga disebabkan karena peningkatan konsumsi dan belanja pemerintah. Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta meningkatnya belanja negara, maka tingkat pengangguran berkurang sering dengan terbukanya berbagai macam lapangan pekerjaan baru.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Timor Leste secara signifikan terjadi pada tahun 2006 dengan adanya kekerasan dan kerusuhan yang terjadi terkait pertikaian antara kelompok militer pembangkang yang dipimpin oleh Komandan Alfredo Reinado dengan kelompok militer. Pemicu konflik ini merupakan akumulasi dari ketidakpuasan kelompok militer pembangkang dengan pemerintahan yang ada. Kekerasan yang terjadi dan berlanjut hingga dilaksanakannya pemilu pada tahun 2007 merupakan akibat dari lemahnya legitimasi pemerintahan yang ada yang kemudian menyebabkan menurunnya stabilitas politik. Kekerasan yang terjadi menunjukkan rendahnya pemahaman politik masyarakat untuk menangani permasalahan politik dengan cara damai. Pasca dilaksanakannya pemilu pada tahun 2007, stabilitas politik kembali dapat dicapai.

Hal ini disebabkan karena tingkat legitimasi pemerintahan baru yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat legitimasi pemerintahan sebelumnya. Sebagian besar partai politik menerima hasil pemilu dengan baik. Dengan adanya pemerintahan baru yang lebih terlegitimasi, maka tingkat kepercayaan investor dan juga keamanan negara mengalami peningkatan. Hal ini kemudian membuka sejumlah lapangan pekerjaan baru di Timor Leste yang akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam perekonomian. Terhitung sejak tahun 2007 kemudian pertumbuhan ekonomi Timor Leste terus mengalami peningkatan dengan semakin meningkatnya stabilitas politik di Timor Leste.

Stabilitas politik kemudian dilihat dapat menjamin keamanan bagi terlaksananya proses ekonomi melalui peningkatan legitimasi pemerintah. Dengan meningkatnya legitimasi pemerintah, maka keamanan juga meningkat yang kemudian berdampak pada meningkatnya kepercayaan investor. Investasi asing yang penting bagi Timor Leste adalah investasi di bidang konstruksi dan infrastruktur. Investasi asing yang meningkat kemudian berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan tingginya produktivitas dan investasi, maka pendapatan negara juga mengalami peningkatan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu stabilitas politik penting bagi penciptaan jaminan keamanan negara yang dapat mendorong masuknya investasi dan menjamin legitimasi pemerintah. Dengan meningkatnya investasi dan jaminan keamanan bagi warga negara, akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam perekonomian yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

### Kesimpulan

*Democracy assistance* USAID yang diberikan kepada Timor Leste melalui kerangka *Electoral and Political Processes* (EPP) dilihat belum efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Timor Leste. Penyebab dari kurang efektifnya *democracy assistance* tersebut disebabkan karena terdapat beberapa karakteristik efektifitas bantuan luar negeri yang tidak terpenuhi dan terutama karena program bantuan yang disusun seringkali tidak sesuai dengan karakter dan kemampuan masyarakat Timor Leste. Ketidaksesuaian ini kemudian memperlambat proses penerimaan demokrasi, tidak hanya di tingkat nasional, namun terlebih lagi di tingkat daerah dan individu. Kurangnya kedewasaan individu dan beberapa partai politik akan sistem politik merupakan dampak dari belum efektifnya program *democracy assistance* USAID di Timor Leste. Hal ini kemudian menyebabkan lambatnya perkembangan dan pemahaman individu mengenai pentingnya proses politik yang berujung pada masih terjadinya beberapa kasus konflik dan kekerasan yang berhubungan dengan isu politik dan pemilu. Konflik dan kekerasan yang masih terjadi di Timor Leste kemudian mengakibatkan gangguan terhadap stabilitas politik di Timor Leste yang pada akhirnya menimbulkan gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi Timor Leste.

Seringkali demokrasi tidak memiliki dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan demokrasi, stabilitas politik dilihat memiliki hubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat bahwa dengan menurunnya stabilitas politik di Timor Leste, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut menurun. Sementara itu, dengan semakin meningkatnya demokrasi, belum tentu pertumbuhan ekonomi ikut mengalami peningkatan. Selain itu, lebih mudah untuk dapat mengamati perubahan stabilitas politik bagi pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan mengamati perubahan demokrasi bagi pertumbuhan ekonomi. Kesulitan untuk mengamati hubungan antara demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena sulitnya indikator untuk meneliti hubungan tersebut. Seringkali proses demokrasi yang dilihat bukan hanya semata-mata demokrasi yang ada di tingkat konseptual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Carothers, Thomas. 1999. *Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Degnbol-Martinussen, John, dan Poul Engberg-Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed Books.
- Manor, James, 2007. *Aid That Work: Successful Development in Fragile States*. Washington: World Bank.
- Picard, Louis A, et al. 2008. *Foreign Aid and Orreign Policy, Lessons for the Next Half-Century*. USA: M.E. Sharpe Inc.
- Stevens, Paul, dan Elisa Cassiandri. 2008. *Resource, Depletion, Dependence, and Development Timor-Leste*. London: Chatam House.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

### Artikel Online

- Anonim. 2010. *Background Note: Timor Leste*. [online]. dalam <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35878.htm> [diakses pada 14 September 2010].
- \_\_\_\_\_. *History of East Timor*. [online]. dalam <http://www.easttimorgovernment.com/history.htm> [diakses pada 7 Oktober 2010].
- \_\_\_\_\_. *Overview Timor Leste*. [online]. dalam <http://www.irishaid.gov.ie/timorleste.asp> [diakses pada 14 September 2010].
- \_\_\_\_\_. *Democracy in Timor-Leste: Information is required!*. [online]. dalam <http://www.laohamutuk.org/reports/09bgnd/DemoInfoEn.pdf> [diakses pada 1 Agustus 2011].
- Chesterma, Simon, 2001. *East Timor in Transition: From Conflict Prevention to State-Building*. [online]. dalam [http://www.humansecuritygateway.com/documents/IPA\\_EastTimorintransition.pdf](http://www.humansecuritygateway.com/documents/IPA_EastTimorintransition.pdf) [diakses pada 9 Oktober 2010].
- La'o, Hamutuk, 2009. *How Much Money Have International Donors Spent on and in Timor-Leste, A briefing Paper from La'o Hamutuk*. [online]. dalam <http://www.laohamutuk.org/reports/09bgnd/HowMuchAidEn.pdf> [diakses pada 17 September 2010].
- Rivera-Batiz, Fransisco L., 2010. *Democracy, Governance and Economic Growth: Theory and Evidence*. [online]. dalam <http://www.columbia.edu/cu/economics/discpaper/DP0102-57.pdf> [diakses pada 30 Desember 2010].
- The Heritage Foundation, 2010. *Index of Economic Freedom 2010*. [online]. dalam <http://www.heritage.org/index/country/timorleste> [diakses pada 8 Desember 2010].



Timor-Leste Government Website. dalam dari <http://timor-leste.gov.tl/> [diakses pada 14 September 2010].

### **Laporan Tahunan**

Asian Development Bank (ADB), 2006. *Asian Development Outlook 2006*.

\_\_\_\_\_, 2006. *Key Indicator of Developing Asian and Pacific Countries, 2006*

\_\_\_\_\_, 2011. *Asian Development Outlook 2011*.

United States Agency for International Development (USAID), 2002. *East Timor Annual Report FY 2002*.

\_\_\_\_\_. 2005. *USAID Strategic Plan for East*.

\_\_\_\_\_, 2008. *USAID Evaluation Report 2008*.

\_\_\_\_\_, 2010. *User's Guide to DG Programming 2010*.

### **Jurnal**

Baum dan Danau, 2003. "Corruption, Democracy and Economic Growth", *International Political Science Review*, **27** (2).

De Haan, Jakob, 2006. "Political Institutions and Economic Growth Reconsidered: Presidential Address for the European Public Choice Society", *Public Choice* **131** (3): 281-292 [online]. dalam <http://www.jstor.org/stable/27698102> [diakses 13 Agustus 2011].

Easterly, William dan Tobias Pfutze, 2008. "Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid", *Journal of Economic Perspectives*, **22** (2).

### **Working Paper**

Friedman, Milton, 1994. "Capitalism and Freedom' dalam *Democracy and Growth*", National Bureau of Economic Research.

Margesson, Rhoda dan Bruce Vaughn, 2009. "East Timor: Political Dynamics, Development and International Involvement", *Congressional Research Service*.

Porter, Doug dan Habib Rab, 2010. "Timor-Leste's Recovery from the 2006 Crisis: Some Lessons", *World Development Report 2010*.

Soares, Santana dan Loa Hamutuk dan John Miller. *Report of the Solidarity Observer Mission for East Timor (SOMET) on the Timor Leste 2007 Parliament Election*.

World Bank. 1989. "Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth: A Long-Term Perspective Study", *Politics of Aid Selectivity*.

### **Makalah Seminar**

Neves, Guteriano Nicolau S., 2006. "The Paradox Of Aid In Timor Leste", dalam seminar *Cooperação Internacional e a Construção do Estado no Timor-Leste*. University of Brasília, Brazil, 25-28 July 2006.